

RINGKASAN

BAGAS JUNIO PRIDASMARA, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Tanggung Jawab Notaris Akibat Pemalsuan Data Penghadap Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, di bawah bimbingan **Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.**, dan **Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum.**

Dokumen merupakan hal penting dalam pembuatan suatu akta dan sering menjadi sumber konflik di masyarakat. Dalam praktik kenotariatan, salah satu masalah yang ada yaitu masalah pemalsuan dokumen, di mana dokumen yang dibawa oleh para penghadap merupakan dokumen palsu atau dibuat seolah-olah asli. Selanjutnya dalam putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr yang mana RU dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan surat atas akta otentik dan menimbulkan kerugian terhadap pemilik sah hak atas tanah karena timbul sertifikat baru yang dasar pembuatannya yakni akta yang isinya sengaja dipalsukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris akibat pemalsuan data penghadap atas akta yang dibuatnya serta akibat hukum akta perjanjian pengikatan jual beli yang sudah dibuat dalam perkara pemalsuan data penghadap dalam putusan nomor 1362/PID.B/2019/PN JKT.UTR. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Penulisan ini menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode penyajian data berupa uraian secara sistematis dan metode analisis data secara normatif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa tanggung jawab Notaris terhadap pemalsuan data penghadap atas akta yang dibuatnya dikenakan sanksi pidana, selain itu dapat juga dikenakan sanksi administratif maupun sanksi perdata. Akibat hukum mengenai pemalsuan data penghadap terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum walaupun Notaris telah mendapat sanksi pidana penjara selama satu tahun delapan bulan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta ini harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk memintakan pembatalan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka baru dapat dikatakan bahwa akta tersebut batal demi hukum atau dalam arti lain tidak pernah dianggap ada akta tersebut. Jika tidak diajukan pembatalan ke pengadilan maka akta yang cacat tersebut masih tetap berlaku.

SUMMARY

BAGAS JUNIO PRIDASMARA, Master's Program in Notary Law, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, The Notary's Responsibility for Data Forgery by the Parties in the Creation of Deeds Based on Decision Number 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, under the supervision of **Prof. Dr. Kadar Pamuji, S.H., M.H.**, and **Dr. Noer Indriati, S.H., M.Hum.**

Documents are essential in the creation of an act and often become a source of conflict in society. In notarial practice, one of the problems encountered is document forgery, where the documents presented by the parties are either false or made to appear authentic. In the ruling Number 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, RU was found guilty of forging documents related to an authentic deed, resulting in harm to the rightful owner of land rights due to the issuance of a new certificate based on a deed whose contents were deliberately falsified.

This research aims to analyze the responsibility of the Notary for the forgery of the presenting party's data in the deeds they create, as well as the legal consequences of the sale and purchase agreement deed made in the case of forgery of the presenting party's data in ruling Number 1362/PID.B/2019/PN JKT.UTR. The research employs a normative juridical method with an approach based on legislation, concepts, and case studies. The writing utilizes secondary data sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods include literature studies, while data presentation is organized systematically and data analysis is conducted qualitatively and normatively.

The results of this research indicate that the Notary's responsibility for the forgery of the presenting party's data in the deeds they create can lead to criminal sanctions. Additionally, they may also face administrative and civil sanctions. The legal consequences of the forgery of the presenting party's data concerning the deeds created by the Notary do not automatically render the deed void by law, even if the Notary has received a prison sentence of one year and eight months based on the court's ruling. The party harmed by the existence of this deed must file a civil lawsuit in court to request the annulment of the deed. Once a decision has been made by the court and the ruling has permanent legal force, only then can it be said that the deed is void by law or, in other words, that the deed is considered to have never existed. If no annulment is filed in court, the defective deed remains valid.